

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di era globalisasi saat ini pengetahuan mengenai perusahaan atau suatu lembaga dapat bersaing dengan lainnya tidak terlepas dari masalah apakah mereka mampu memberikan dan menyediakan pelayanan yang memuaskan bagi tenaga kerja dan konsumen untuk waktu yang lama sehingga apa yang menjadi tujuan utama dapat tercapai. Untuk itu suatu instansi perusahaan atau lembaga harus tepat dan cermat dalam melakukan pengambilan keputusan, mampu menjalankan fungsi manajemen dan juga peran sistem informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Sistem informasi berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi pemerintah atau perusahaan, hal ini ditujukan untuk memperlancar operasional kerja. Berkembangnya teknologi informasi memiliki peranan sangat penting dalam menjadwalkan aktivitas manusia, baik dalam dunia sosial maupun dunia pekerjaan (Handayani, 2012: 6).

Perkembangan sistem informasi sangat berkaitan erat dengan akuntansi pada umumnya dan khususnya penganggaran yang berguna untuk operasional setiap organisasi. Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi, sistem informasi akuntansi konvensional telah berkembang menjadi sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer.

Sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer memungkinkan pemakai laporan keuangan dapat melihat laporan keuangan setiap saat dan menyajikannya lebih cepat dan akurat mengenai informasi keuangan. Informasi keuangan sangat penting bagi perusahaan/lembaga untuk melakukan riset mengenai informasi yang disajikan, dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan pada periode yang sebelumnya. Informasi keuangan juga menunjukkan hasil apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat atau periode tertentu (Kasmir, 2013: 220).

Berdasarkan hal ini laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat penting dan dapat dipercaya mengenai posisi keuangan yang relevan dan akan lebih bermanfaat apabila penyusunan tepat pada waktunya. Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan, sehingga jelas batas pelaporan dari posisi harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dari instansi, perusahaan atau suatu lembaga yang akan dilaporkan.

Penyajian laporan keuangan harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar, dalam arti tidak terlalu terlambat sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang sifatnya manajerial maupun teknis. Dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbasis komputer, waktu pembuatan dan penyajian laporan keuangan khususnya terkait dengan anggaran akan lebih cepat dan tepat pada waktunya jika didukung oleh aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Aplikasi SAKPA dibuat untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan memberikan kemudahan pembuatan laporan standar akuntansi pemerintah di unit kuasa pengguna anggaran (Ningrum, 2012: 11).

Penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor (dalam hal ini BPK) terhadap laporan keuangan yang disajikan (Herlina, 2012: 9). Oleh karena itu perlunya menerapkan SAP dengan benar dan tepat. Hal ini sangat penting karena SAP merupakan standar akuntansi yang harus dipakai dan diikuti dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi bantuan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dalam mempermudah pembuatan laporan keuangan, masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan/lembaga.

Terjadinya perubahan terhadap kebijakan akuntansi mengakibatkan perubahan pada aplikasi VERA maupun SAKPA, perubahan ini dilakukan melalui *up date* aplikasi. Terjadinya perbedaan antara aplikasi SAKPA dan Aplikasi VERA yang telah mengalami perubahan akan menimbulkan ketidakcocokan data keluaran yang dihasilkan dan akan mempengaruhi waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI. Semakin banyak update aplikasi SAKPA maka waktu penyelesaian rekonsiliasi data SAI menjadi semakin panjang (Wibowo, 2013: 26).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan contoh salah satu lembaga dengan jumlah anggaran yang besar dari anggaran dana APBN hal ini terkait dengan adanya anggaran untuk kepentingan pemilihan umum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, memelihara arsip dan dokumen pemilu, mengelola barang inventaris pemilu dan bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam membantu penyusunan dan pembuatan laporan keuangan diperlukan sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi serta menggunakan aplikasi SAKPA. Penyajian informasi keuangan dan non-keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan adanya dukungan program sistem informasi akuntansi yaitu Aplikasi SAKPA (Handayani, 2012: 6).

Berdasarkan peraturan KPU nomor 22 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat Jenderal KPU terdiri dari biro perencanaan dan data, biro keuangan, biro hukum, biro umum, biro sumber daya manusia, biro teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, biro logistik dan inspektorat (Laporan, 2012: 48). Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa, segala kegiatan akuntansi telah menggunakan sistem berbasis komputer dan khususnya anggaran menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer dan didukung oleh aplikasi bantuan yaitu Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Bendahara keuangan KPU Kota Gorontalo dalam melakukan penyusunan laporan keuangan betul-betul memahami konsep penyusunan laporan keuangan dan sudah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara umum (Renyowijoyo, 2008: 65).

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berbasis komputer dengan bantuan aplikasi SAKPA tidak lepas dari peran SDM. Menurut salah satu pegawai KPU bagian keuangan terkait dengan penggunaan sistem yang telah berbasis komputer dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan menyatakan:

“Saya itu belum paham memakai komputer, saya ini sebenarnya jurusan sosiologi, jadi susah menyesuaikan dengan tugas di keuangan, tapi lama kelamaan tetap bisa. Tugas yang saya pegang ada di bagian keuangan, logistik dan pengadaan barang, jadi saya bingung yang mana seharusnya di kerjakan lebih dahulu, apalagi saya sering lupa”.

(wawancara: 20 Maret 2014)

Waktu melakukan rekonsiliasi di KPPN Gorontalo data yang disajikan tidak sesuai, salah satu pegawai KPU menyatakan:

“Lebih baik saya yang pergi melakukan rekonsiliasi di KPPN berulang-ulang kali, dari pada membuat laporan itu saya kurang mengerti apa lagi data yang banyak sekali”.

(wawancara: 20 Maret 2014)

Pegawai KPPN Gorontalo selalu mengarahkan dan menjelaskan dimana letak kesalahannya, kemudian dilaporkan kepada pimpinan bagian keuangan. Waktu melakukan rekonsiliasi pada hari yang sama kurang lebih lima kali. Hal ini dapat menyebabkan penundaan pengerjaan laporan keuangan, karena pembagian tugas belum sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pegawai.

Menurut Herlina (2012: 9) penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada tahun 2012, kendala yang dihadapi oleh kantor LPP TVRI Stasiun Riau di bidang keuangan dari sistem pencatatan dan sistem pelaporan data yang sudah memakai aplikasi SAKPA, yaitu Sumber Daya

Manusia dengan keterbatasan kemampuan dan waktu tunda dari penyampaian laporan keuangan. Perubahan yang dilakukan melalui *update* aplikasi SAKPA secara otomatis dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem informasi akuntansi yang telah berbasis komputer, dapat menyebabkan kesalahan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan pemikiran dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam khususnya ingin mengetahui apa saja yang menyebabkan kesalahan pembuatan laporan keuangan yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan bantuan aplikasi SAKPA. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul "**Implementasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA), Studi Kasus Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo**".

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, sehingga kegiatan yang berbeda dilakukan oleh satu orang.
2. Waktu penyelesaian rekonsiliasi di KPPN Kota Gorontalo semakin panjang dikarenakan data yang disajikan tidak sesuai.
3. Sering terjadi kesalahan dalam penginputan data laporan keuangan.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dalam mempermudah pembuatan laporan keuangan.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dalam mempermudah pembuatan laporan keuangan.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu teknologi mengenai penggunaan sistem yang telah berbasis komputer dan menambah kajian ilmu akuntansi terkait penggunaan komputer dalam mempermudah pembuatan dan penyajian laporan keuangan dengan bantuan aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja pegawai dalam menangani masalah yang dihadapi terkait penggunaan sistem berbasis komputer dan bantuan aplikasi SAKPA.

2. Bagi Peneliti

Memberikan gambaran untuk melaksanakan, mengimplementasikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak terkait dalam penelitian, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk menunjukkan kemampuannya dibidang Akuntansi, serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).